

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "**Distribusi Pendapatan Nasional dan Determinannya**" tepat pada waktunya.

Makalah ini disusun untuk memenuhi kebutuhan dalam memahami lebih dalam konsep distribusi pendapatan nasional, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Penulis berusaha menyajikan pembahasan secara sistematis dan berdasarkan referensi yang relevan agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan baik dalam isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan bagi semua pihak yang membacanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan	2
BAB II. PEMBAHASAN	3
A. Bentuk Distribusi Pendapatan	3
B. Determinan Distribusi Pendapatan Nasional	4
C. Upaya Pemerataan Distribusi Pendapatan	7
BAB III. PENUTUP	10
A. KESIMPULAN.	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perekonomian modern, persoalan distribusi pendapatan nasional menjadi salah satu isu sentral yang menentukan kualitas pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis membawa pemerataan kesejahteraan. Banyak negara mengalami apa yang disebut paradoks pertumbuhan, yaitu meningkatnya produk domestik bruto (PDB) tetapi disertai ketimpangan pendapatan yang semakin melebar (Todaro & Smith, 2015).

Distribusi pendapatan nasional mengacu pada bagaimana pendapatan dari kegiatan ekonomi dibagikan kepada berbagai individu atau kelompok dalam masyarakat. Keadilan dalam distribusi ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial, memperkuat kohesi nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Sukirno, 2016). Tanpa distribusi pendapatan yang adil, kemajuan ekonomi hanya akan dinikmati segelintir pihak, sementara sebagian besar masyarakat tetap terjebak dalam kemiskinan.

Berbagai indikator menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah global. Laporan World Inequality Report (2022) mengungkapkan bahwa 10% kelompok terkaya di dunia menguasai sekitar 52% pendapatan global, sementara 50% populasi termiskin hanya berbagi kurang dari 8%. Di negara berkembang seperti Indonesia, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif dalam dua dekade terakhir, koefisien Gini tetap menunjukkan tingkat ketimpangan yang mengkhawatirkan (World Bank, 2020).

Beberapa faktor mendasari ketidakmerataan distribusi pendapatan, di antaranya perbedaan tingkat pendidikan, kepemilikan aset, struktur pasar tenaga kerja, dan ketidakmerataan kesempatan ekonomi. Pendidikan, misalnya, sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk memperoleh pendapatan. Mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung mendapatkan penghasilan lebih baik (Becker, 1993).

Selain itu, globalisasi dan liberalisasi ekonomi juga berdampak ambivalen terhadap distribusi pendapatan. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi negara berkembang untuk tumbuh lebih cepat melalui perdagangan internasional, namun di sisi lain, ia juga memperparah ketimpangan jika tidak diimbangi dengan kebijakan distribusi yang efektif (Stiglitz, 2002).

Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi distribusi pendapatan nasional agar dapat merumuskan kebijakan yang mampu menciptakan pemerataan. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, ketimpangan pendapatan dapat

memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, meningkatkan ketidakstabilan sosial, serta melemahkan fondasi demokrasi (Piketty, 2014).

Dalam konteks ini, makalah ini bertujuan untuk mengkaji konsep distribusi pendapatan nasional serta faktor-faktor determinan yang mempengaruhi pola distribusi tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan strategi kebijakan ekonomi yang lebih adil dan inklusif.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Bentuk Distribusi Pendapatan ?
2. Bagaimana Determinan Distribusi Pendapatan Nasional ?
3. Bagaimana Upaya Pemerataan Distribusi Pendapatan ?

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui Bagaimana Bentuk Distribusi Pendapatan
2. Untuk mengetahui Bagaimana Determinan Distribusi Pendapatan Nasional
3. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Pemerataan Distribusi Pendapatan

BAB II

PEMBAHASAN

A. BENTUK DISTRIBUSI PENDAPATAN

Distribusi pendapatan dalam suatu negara tidak hanya menggambarkan bagaimana pendapatan tersebar antar individu atau kelompok, tetapi juga mencerminkan struktur sosial dan ekonomi yang mendasarinya. Secara umum, bentuk distribusi pendapatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu **distribusi pendapatan fungsional** dan **distribusi pendapatan personal**.

1. Distribusi Pendapatan Fungsional

Distribusi pendapatan fungsional merujuk pada bagaimana pendapatan nasional dibagi berdasarkan peran faktor-faktor produksi dalam menghasilkan output ekonomi. Faktor produksi tersebut mencakup tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan (Mankiw, 2014). Setiap faktor produksi menerima pendapatan sesuai dengan kontribusinya, yang biasanya berbentuk:

- **Upah (wages)** untuk tenaga kerja,
- **Sewa (rent)** untuk tanah,
- **Bunga (interest)** untuk modal,
- **Laba (profit)** untuk kewirausahaan.

Teori distribusi fungsional sering kali dijelaskan dengan menggunakan pendekatan ekonomi neoklasik, yang berasumsi bahwa pasar bersifat kompetitif sempurna dan faktor produksi dibayar sesuai dengan produk marginal mereka (Nicholson & Snyder, 2012). Dalam praktiknya, ketidaksempurnaan pasar, seperti monopoli kekuatan tawar tenaga kerja atau modal, sering mengganggu teori ideal ini dan menyebabkan distribusi yang tidak seimbang.

Distribusi fungsional ini penting karena menjadi dasar bagi analisis bagaimana perubahan teknologi, kebijakan upah minimum, perubahan pajak, atau globalisasi bisa memengaruhi aliran pendapatan antara faktor produksi.

2. Distribusi Pendapatan Personal

Distribusi pendapatan personal mengacu pada bagaimana pendapatan nasional didistribusikan di antara individu atau rumah tangga tanpa memperhitungkan sumber pendapatan tersebut (Todaro & Smith, 2015).

Dengan kata lain, distribusi ini fokus pada siapa yang menerima berapa banyak, bukan dari mana pendapatan itu berasal.

Untuk mengukur distribusi pendapatan personal, digunakan berbagai alat statistik, antara lain:

- **Kurva Lorenz**, yang menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan.
- **Koefisien Gini**, yang mengukur tingkat ketimpangan; semakin mendekati 1, ketimpangan semakin tinggi.

Dalam realitas ekonomi, distribusi personal sering kali memperlihatkan ketimpangan signifikan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, warisan, perbedaan keterampilan, serta diskriminasi gender atau rasial (Atkinson, 2015).

3. Bentuk Lain: Distribusi Regional dan Sektoral

Selain distribusi fungsional dan personal, terdapat pula pembahasan mengenai:

- **Distribusi Pendapatan Regional**, yaitu ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah dalam suatu negara. Misalnya, kawasan perkotaan cenderung memiliki pendapatan rata-rata lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan.
- **Distribusi Sektoral**, yaitu perbedaan pendapatan berdasarkan sektor ekonomi seperti pertanian, industri, dan jasa.

Distribusi pendapatan antar sektor ini sangat relevan terutama dalam negara berkembang, di mana modernisasi ekonomi belum merata ke seluruh sektor (Lewis, 1954).

4. Implikasi Bentuk Distribusi Pendapatan

Bentuk distribusi pendapatan memiliki implikasi besar terhadap pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan stabilitas politik. Distribusi yang terlalu timpang dapat memicu ketidakpuasan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan memperkuat siklus kemiskinan antar generasi (Stiglitz, 2012).

Sebaliknya, distribusi pendapatan yang lebih merata mendukung pembangunan yang inklusif dan meningkatkan konsumsi agregat.

B. DETERMINAN DISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL

Distribusi pendapatan nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling berinteraksi. Faktor-faktor ini menentukan bagaimana kekayaan dan pendapatan tersebar di antara individu, kelompok, maupun wilayah di suatu negara. Memahami determinan distribusi pendapatan penting agar pemerintah dan pemangku kebijakan dapat merancang intervensi yang efektif untuk mengurangi ketimpangan.

Adapun beberapa determinan utama distribusi pendapatan nasional adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam distribusi pendapatan. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki keterampilan yang lebih baik, yang kemudian dihargai lebih tinggi di pasar tenaga kerja (Becker, 1993). Dalam masyarakat dengan akses pendidikan yang merata, ketimpangan pendapatan cenderung lebih rendah dibandingkan masyarakat di mana hanya kelompok tertentu yang dapat mengakses pendidikan bermutu.

Pendidikan juga berperan dalam mobilitas sosial ekonomi. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi adalah salah satu cara paling efektif untuk memperbaiki distribusi pendapatan dalam jangka panjang (Psacharopoulos & Patrinos, 2018).

2. Struktur Pasar Tenaga Kerja

Struktur dan dinamika pasar tenaga kerja sangat menentukan bagaimana pendapatan didistribusikan.

Faktor-faktor seperti:

- Upah minimum,
- Serikat pekerja,
- Fleksibilitas tenaga kerja,
- Diskriminasi berdasarkan gender atau etnis, memiliki pengaruh besar terhadap ketimpangan pendapatan (Borjas, 2016).

Pasar tenaga kerja yang kompetitif dan inklusif cenderung menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih adil, sementara pasar tenaga kerja yang tersegmentasi, di mana akses terhadap pekerjaan bergaji tinggi dibatasi untuk kelompok tertentu, memperburuk ketimpangan.

3. Kepemilikan Aset

Distribusi aset, terutama tanah, properti, dan modal finansial, memiliki pengaruh besar terhadap distribusi pendapatan. Di banyak negara berkembang, konsentrasi kepemilikan tanah di tangan sedikit orang menyebabkan ketimpangan pendapatan yang tinggi (Deininger & Squire, 1998).

Akses terhadap aset produktif memungkinkan individu untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan di luar upah, seperti dari sewa atau dividen. Oleh karena itu, reformasi agraria, akses terhadap kredit, dan kebijakan kepemilikan saham yang lebih luas menjadi penting dalam memperbaiki ketimpangan.

4. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk pola distribusi pendapatan melalui kebijakan:

- Pajak (taxation),
- Subsidi,
- Program perlindungan sosial,
- Investasi dalam infrastruktur dan layanan publik.

Sistem pajak progresif, di mana individu berpendapatan tinggi membayar proporsi pajak yang lebih besar, terbukti efektif dalam mengurangi ketimpangan (Musgrave & Musgrave, 1989).

Begitu pula program jaminan sosial seperti bantuan tunai, asuransi kesehatan nasional, dan pendidikan gratis, membantu meningkatkan pendapatan kelompok berpendapatan rendah.

5. Globalisasi dan Perdagangan Internasional

Globalisasi membuka peluang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa tantangan terhadap distribusi pendapatan. Negara-negara yang terintegrasi dalam ekonomi global cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi, namun ketimpangan pendapatan di dalam negeri bisa meningkat apabila keuntungan globalisasi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu (Stiglitz, 2002).

Buruh berpendidikan rendah, misalnya, sering kali terdampak negatif akibat persaingan global, sementara tenaga kerja berpendidikan tinggi justru mendapatkan peluang lebih banyak.

6. Perkembangan Teknologi

Kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi dan otomasi, telah mengubah struktur pekerjaan secara radikal. Teknologi baru cenderung meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja berketerampilan tinggi, sementara mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja dengan keterampilan rendah (Autor, 2014).

Akibatnya, terjadi "polarization" di pasar kerja: pekerjaan berupah rendah dan sangat tinggi tumbuh, sementara pekerjaan menengah berkurang.

Jika akses terhadap pendidikan teknologi tidak merata, maka perkembangan teknologi akan memperburuk ketimpangan pendapatan.

7. Faktor Demografis

Perubahan struktur demografis, seperti tingkat kelahiran, urbanisasi, dan usia produktif, juga mempengaruhi distribusi pendapatan.

Misalnya, daerah dengan penduduk usia produktif yang tinggi cenderung memiliki pendapatan rata-rata lebih tinggi dibandingkan daerah yang didominasi oleh anak-anak atau lansia (Bloom & Canning, 2004).

Urbanisasi, meskipun sering mempercepat pertumbuhan ekonomi, juga dapat memperlebar ketimpangan antar wilayah jika pembangunan tidak tersebar secara merata.

C. UPAYA PEMERATAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Pemerataan distribusi pendapatan nasional merupakan salah satu tujuan utama kebijakan ekonomi dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan stabilitas sosial-ekonomi. Ketimpangan distribusi pendapatan yang terlalu besar dapat memicu ketidakpuasan sosial, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan memperburuk masalah kemiskinan (Todaro & Smith, 2015).

Berikut ini beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mencapai pemerataan distribusi pendapatan:

1. Reformasi Sistem Perpajakan

Salah satu alat utama yang digunakan negara untuk mengurangi ketimpangan pendapatan adalah melalui kebijakan perpajakan. Sistem pajak progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan naiknya pendapatan, dapat mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin (Musgrave & Musgrave, 1989).

Selain pajak penghasilan, pajak atas kekayaan, seperti pajak properti atau warisan, juga dapat membantu mengurangi akumulasi kekayaan yang berlebihan di kalangan elit ekonomi (Piketty, 2014).

2. Program Transfer dan Jaminan Sosial

Program transfer langsung, seperti bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfer) atau subsidi pangan, memberikan bantuan langsung kepada kelompok berpendapatan rendah, sehingga meningkatkan daya beli mereka.

Program jaminan sosial seperti:

- Asuransi kesehatan nasional,
- Pensiun,
- Bantuan pengangguran, juga penting untuk memperkecil kesenjangan ekonomi (Barr, 2012).

Negara-negara yang memiliki sistem jaminan sosial yang kuat, seperti negara-negara Nordik, cenderung memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah.

3. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

Pendidikan berperan krusial dalam pemerataan pendapatan. Akses yang merata terhadap pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi akan meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan (Becker, 1993).

Investasi dalam pendidikan anak usia dini, pelatihan vokasional, serta pendidikan STEM (science, technology, engineering, and mathematics) sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Psacharopoulos & Patrinos, 2018).

4. Peningkatan Akses Terhadap Kesehatan

Kesehatan yang baik adalah prasyarat untuk produktivitas ekonomi. Akses yang adil terhadap layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang (Bloom, Canning, & Sevilla, 2004).

Program kesehatan masyarakat seperti imunisasi gratis, penyuluhan gizi, dan pengendalian penyakit menular sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

5. Kebijakan Ketenagakerjaan yang Inklusif

Kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung hak-hak buruh, mendorong penciptaan lapangan kerja layak, serta mengurangi diskriminasi di pasar tenaga kerja merupakan langkah penting dalam pemerataan distribusi pendapatan.

Upah minimum yang ditetapkan dengan bijaksana dapat meningkatkan pendapatan buruh berpenghasilan rendah tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan (Borjas, 2016).

Penguatan serikat pekerja dan dialog sosial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah juga dapat memperbaiki keseimbangan kekuatan di pasar tenaga kerja.

6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM memainkan peran vital dalam menciptakan lapangan kerja dan mendistribusikan pendapatan ke seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti:

- Akses terhadap kredit mikro,
- Penyederhanaan perizinan usaha,
- Pelatihan manajerial dan teknis, akan membantu memperbaiki distribusi pendapatan, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota (Tambunan, 2009).

7. Pemerataan Pembangunan Wilayah

Ketimpangan antarwilayah sering menjadi sumber utama ketimpangan pendapatan nasional. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang inklusif dan berbasis wilayah sangat penting.

Investasi infrastruktur (jalan, listrik, internet) di daerah tertinggal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi setempat dan membuka peluang kerja baru. Selain itu, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang efektif juga berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan (World Bank, 2009).

8. Reformasi Kepemilikan Aset

Pemerataan akses terhadap aset produktif, seperti tanah, perumahan, dan saham perusahaan, merupakan bagian penting dari strategi pemerataan pendapatan. Program reformasi agraria dan bantuan perumahan rakyat dapat membantu kelompok miskin membangun fondasi ekonomi mereka (Deininger, 2003).

Inisiatif seperti employee stock ownership plans (ESOP) yang memungkinkan pekerja memiliki saham di perusahaan tempat mereka bekerja juga dapat membantu mengurangi ketimpangan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Distribusi pendapatan nasional merupakan aspek krusial dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Distribusi yang tidak merata dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik, seperti meningkatnya kemiskinan, ketimpangan sosial, dan instabilitas nasional. Oleh karena itu, memahami bentuk-bentuk distribusi pendapatan — seperti distribusi fungsional dan distribusi personal — menjadi penting untuk mengidentifikasi pola-pola ketidakmerataan yang terjadi.

Determinasi distribusi pendapatan nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pendidikan, struktur ekonomi, kebijakan pemerintah, teknologi, globalisasi, dan demografi. Semua faktor ini berinteraksi dalam menentukan siapa yang memperoleh bagian lebih besar dari pendapatan nasional.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan, seperti reformasi sistem perpajakan, program jaminan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif, pemberdayaan UMKM, pemerataan pembangunan wilayah, dan reformasi kepemilikan aset.

Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Secara keseluruhan, pemerataan distribusi pendapatan tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga untuk memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil, dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Distribusi Pendapatan dan Ketimpangan di Indonesia*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Strategi Pemerintah dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Pemerataan Pembangunan untuk Mengurangi Kesenjangan*. Diakses dari <https://www.bappenas.go.id/>
- Komite Penanganan Kemiskinan Ekstrem. (2023). *Upaya Pemerintah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial dan Pemerataan Ekonomi*. Diakses dari <https://www.kemenkoekon.go.id/>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Meningkatkan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/>
- Pusat Kajian Kebijakan Ekonomi UI. (2021). *Ketimpangan Pendapatan di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Diakses dari <https://www.p2kek.ui.ac.id/>
- Republika. (2023). *Upaya Pemerintah Mengurangi Ketimpangan Sosial Melalui Reformasi Pajak*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/>
- Katadata. (2023). *Ketimpangan Ekonomi dan Upaya Pemerataan di Indonesia*. Diakses dari <https://katadata.co.id/>